

PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN BOVEN DIGOEL PROVINSI PAPUA SELATAN

Febriyanti Kristin Kamenong

NPP. 31.1027

Asdaf Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan

Program Studi Keuangan Publik

Email: ayufebriyanti797@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Andi Fitri Rahmadany, S.IP,M.Tr.IP

ABSTRACT

Problem Statment/Background (GAP): Financial management is a crucial element for the government as it serves as a means to achieve good governance. Moreover, the government is required to present high-quality financial reports as a form of accountability for its administration. Good financial management is essential to prevent financial misconduct and ensure that every financial process in the region runs smoothly and targets are met. **Purpose:** This study aims to understand the role of the local government in fulfilling its obligation to provide transparent and accountable information in regional financial management. One form of government accountability to the public is the Regional Financial Report, which is an implementation of Government Regulation No. 58 of 2005 concerning Regional Financial Management, Article 151, which stipulates that financial management must be carried out economically, efficiently, and effectively or in accordance with the value-for-money principle, as well as participatory, transparent, accountable, and fair to promote economic growth and regional self-sufficiency. **Methods:** The method used in this research is descriptive qualitative with an inductive approach. The data used are primary and secondary data collected through interviews and documentation, with informant samples determined using purposive sampling techniques. **Results:** The research findings show that Boven Digoel Regency has successfully implemented government regulations related to good regional financial management. Despite some obstacles and challenges, these have been managed well, ensuring that the quality of financial management and financial reporting is maintained. **Conclusion:** The Regional Financial and Asset Management Agency of Boven Digoel Regency needs to maintain good revenue management by streamlining the cost selection process and expanding the cost base to produce accurate revenue figures in the annual financial report. Additionally, controlling expenditures and the use of costs is also crucial to ensure proper distribution and use of monetary assets, which can be translated into accurate planning and controlled expenditures as reflected in the financial report. Efforts to improve the quality of financial reports require orderly, fair, and optimal financial management, as well as careful evaluation of financial management to produce accurate financial recording and disclosure, including principal amounts, borrowing costs, and replacement plans.

Keywords: Financial Report Quality, Financial Management

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pengelolaan keuangan merupakan unsur penting bagi pemerintah dimana sebagai sarana dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Selain itu, pemerintah diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang berkualitas sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahannya. Pengelolaan Keuangan yang baik sangat dibutuhkan untuk menjamin tidak terjadinya pelanggaran-pelanggaran penyalahgunaan keuangan serta untuk memastikan setiap proses keuangan daerah berjalan dengan baik dan tepat sasaran. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah Daerah menjalankan kewajiban untuk menyampaikan informasi secara transparan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satu bentuk akuntabilitas pemerintah kepada Masyarakat yaitu berupa Laporan Keuangan Daerah yang merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 151 tentang Pengelolaan Keuangan yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip value for money serta partisipatif, transparatif dan akuntabilitas dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta kemandirian suatu daerah. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, dengan sampel informan yang ditentukan menggunakan teknik purposive sampling. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Boven Digoel telah berhasil melaksanakan Peraturan Pemerintah terkait dengan Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, meskipun masih terdapat beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi tetapi telah ditangani dengan baik sehingga Pengelolaan Keuangan dalam kualitas Laporan Keuangan dapat berjalan dengan baik. **Kesimpulan:** Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boven Digoel perlu mempertahankan manajemen pendapatan yang baik melalui proses pemilihan biaya yang diperlancar dan basis biaya yang diperluas untuk menghasilkan angka pendapatan yang tepat dalam laporan keuangan tahunan. Selain itu, pengendalian pengeluaran dan penggunaan biaya juga sangat penting untuk memastikan distribusi dan penggunaan aset moneter yang layak, yang dapat diterjemahkan menjadi perencanaan yang akurat dan pengeluaran yang terkendali, sebagaimana tercermin dalam laporan keuangan. Upaya peningkatan kualitas laporan keuangan memerlukan manajemen keuangan yang teratur, wajar, dan optimal, serta evaluasi manajemen keuangan yang cermat untuk menghasilkan pencatatan dan pengungkapan keuangan yang tepat, termasuk jumlah pokok, biaya pinjaman, dan rencana penggantian.

Kata kunci: Kualitas Laporan Keuangan, pengelolaan keuangan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Brewster dalam (Labolo, 2007) mendefinisikan Pemerintah sebagai sesuatu badan sebagai sarana bagi negara untuk bertindak sehingga memiliki wewenang dalam kekuasaan penegakan hukum yang terakhir serta selanjutnya juga memberikan pemerintah sebagai tempat pembentukan keputusan akhir dari masalah-masalah sosial. Menurut (Sedarmayanti, 2011) pemerintahan atau Government yaitu suatu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian atau negara kota dan sebagainya. Dalam hal ini Pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam Pengelolaan keuangan daerah yang harus dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip value for money serta partisipatif, transparatif dan akuntabilitas dan keadilan akan dapat mendorong

pertumbuhan ekonomi serta kemandirian suatu daerah. Laporan akuntabilitas instansi pemerintah merupakan alat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu persyaratan untuk tercapainya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Tuntutan Masyarakat terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah semakin menguat berkenaan dengan hal tersebut penciptaan akuntabilitas publik harus dilaksanakan dalam sistem dan standar akuntansi pemerintahan untuk dapat menciptakan good governance.

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia telah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Sebelumnya sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menganut sistem sentralisasi yang berubah menjadi desentralisasi karena adanya reformasi birokrasi yang dimulai sejak tahun 1999. Pemerintah yang awalnya dikendalikan oleh pemerintah pusat sekarang kewenangannya dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Berlakunya sistem desentralisasi ini, maka lahirlah era otonomi daerah. “Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah diberi keleluasaan dalam mengatur atau mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi secara transparan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satu bentuk akuntabilitas pemerintah kepada Masyarakat yaitu berupa Laporan Keuangan Daerah. Pelaporan keuangan diwujudkan kedalam sebuah Laporan Keuangan Pemerintah (LKP) yang bersifat nasional dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada tingkat pemerintah daerah yang mana entitas pelaporannya akan di periksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) sebagai bentuk pelaksanaan pelaporan dan pengelolaan keuangan daerah untuk mengetahui kredibilitas laporan tersebut maka harus dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang diatur menurut Undang-Undang no 15 Tahun 2006 tentang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Laporan Keuangan dapat dikatakan berkualitas apabila laporan keuangan yang disajikan setiap tahunnya mendapatkan penilaian berupa Opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara terhadap empat opini yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan yakni: opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini Tidak Wajar (TW) dan pernyataan menolak opini. Namun pada pelaksanaan pengelolaan keuangan dalam hal ini laporan keuangan pemerintah daerah masih banyak mengalami permasalahan terkait dengan kualitas laporan keuangan dimana terdapat banyak pemerintah daerah yang menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan yang mana menunjukkan bahwa kualitas laporan yang diberikan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang akuntanble dan auditable.

Tabel 1.1
Penilaian BPK Terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Boven Digoel Tahun 2019-2023

<i>NO</i>	<i>TAHUN ANGGARAN</i>	<i>KETERANGAN</i>
1.	2019	WDP
2.	2020	WDP
3.	2021	WDP
4.	2022	WDP
5.	2023	WDP

Sumber Data: BPK RI 2019-2023

Kabupaten Boven Digoel adalah menjadi salah satu daerah tertinggal di Provinsi Papua Selatan, Indonesia. Ibukotanya adalah Tanah Merah. Pemerintah Kabupaten Boven Digoel dalam 4 tahun berturut turut 2019-2023 pada LKPD mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK RI. Tabel diatas menunjukkan bahwa perkembangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel cari tahun 2019-2023 mendapatkan penilaian opini Wajar Dengan Pengecualiaan. Penilaian BPK terhadap kinerja pelaporan keuangan daerah kabupaten Boven digoel menjadi tolak ukur bahwa pelaporan keuangan daerah di Kabupaten Boven masih banyak yang harus diperbaiki dan harus ditingkatkan. Melihat fakta tersebut dalam pengelolaan keuangan daerah pengelolaan alokasi anggaran yang diberikan harus tepat sasaran dan sesuai dengan yang telah di anggarkan karena jika tidak sesuai atau bermasalah dalam pelaporan keuangan maka tidak ada peningkatan menjadi Wajib Tanpa Pengecualiaan dan tetap mempertahankan Wajib Dengan Pengecualiaan.

Pemerintah kabupaten Boven Digoel melalui otonomi daerah diharapkan dapat mengatasi masalah terkait dengan pengelolaan keuangan dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi permasalahan yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Boven Digoel adalah Organisasi Pemerintah Daerah masih belum mempublikasikan laporan mengenai keuangan pada website resmi terkait sehingga dalam pengelolaan keuangan maka Pemerintah Daerah khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boven Digoel diharapkan perlu meningkatkan peran pengelolaan keuangan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan di Kabupaten Boven Digoel sehingga mampu melakukan pengelolaan keuangan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar kedepannya mendapat opini laporan keuangan dengan opini yang terbaik yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualiaan

1.3 Penelitian Terdahulu

- 1) **Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah:** Transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci dalam pengelolaan keuangan daerah yang efektif. Studi menunjukkan bahwa peningkatan transparansi dalam pelaporan keuangan dapat mengurangi korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah (Harun & Kamase, 2020). Oleh karena itu, Kabupaten Boven Digoel harus terus meningkatkan keterbukaan informasi keuangan untuk memastikan laporan keuangan yang akurat dan dapat diandalkan.
- 2) **Penggunaan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Keuangan:** Implementasi teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi laporan keuangan. Penelitian di beberapa daerah menunjukkan bahwa penggunaan sistem informasi

keuangan daerah (SIKD) dapat mempercepat proses pelaporan dan mengurangi kesalahan manusia (Yusuf & Tahir, 2019). Kabupaten Boven Digoel perlu mengadopsi teknologi ini untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan.

- 3) **Pelatihan dan Pengembangan SDM Keuangan Daerah:** Pelatihan yang kontinu bagi pegawai pengelola keuangan daerah sangat penting untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman mereka terhadap regulasi keuangan terbaru. Studi menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi SDM berhubungan positif dengan kualitas laporan keuangan daerah (Nugroho, 2021). Kabupaten Boven Digoel harus menginvestasikan lebih banyak sumber daya untuk pelatihan SDM.
- 4) **Pengawasan Internal dan Audit Keuangan:** Pengawasan internal yang kuat dan audit keuangan yang rutin dapat mendeteksi serta mencegah penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurut Putri dan Raharjo (2020), efektivitas pengawasan internal berperan signifikan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Boven Digoel perlu memperkuat fungsi pengawasan internal untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur keuangan.
- 5) **Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan:** Penerapan standar akuntansi pemerintahan yang konsisten dapat meningkatkan keandalan dan komparabilitas laporan keuangan daerah. Setiawan (2019) menemukan bahwa daerah yang menerapkan standar akuntansi pemerintah dengan baik cenderung memiliki laporan keuangan yang lebih baik. Kabupaten Boven Digoel harus memastikan penerapan standar akuntansi yang sesuai.
- 6) **Efisiensi Pengelolaan Anggaran Daerah:** Efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah dapat mengurangi pemborosan dan meningkatkan alokasi sumber daya untuk program yang lebih produktif. Riset oleh Priyanto dan Handayani (2021) menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran yang efisien berhubungan dengan kualitas laporan keuangan yang lebih baik. Kabupaten Boven Digoel harus meningkatkan efisiensi dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran.
- 7) **Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Pengawasan Keuangan Daerah:** Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran penting dalam mengaudit laporan keuangan daerah untuk memastikan kepatuhan dan keakuratan. Menurut Santoso (2020), laporan keuangan daerah yang diaudit oleh BPK cenderung lebih akurat dan transparan. Kabupaten Boven Digoel perlu terus bekerja sama dengan BPK untuk meningkatkan kualitas laporan keuangannya.
- 8) **Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Daerah:** Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Studi oleh Sari dan Kurniawan (2021) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berkontribusi positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Kabupaten Boven Digoel perlu mendorong partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran dan pengawasan keuangan.
- 9) **Penerapan Sistem Pengendalian Internal:** Sistem pengendalian internal yang efektif dapat mencegah terjadinya penyelewengan dan memastikan laporan keuangan yang akurat. Menurut penelitian oleh Wijaya (2019), penerapan pengendalian internal yang baik berhubungan erat dengan kualitas laporan keuangan daerah. Kabupaten Boven Digoel harus memastikan bahwa sistem pengendalian internal diterapkan secara konsisten.
- 10) **Pengaruh Kebijakan Fiskal terhadap Kualitas Laporan Keuangan:** Kebijakan fiskal yang jelas dan konsisten dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian oleh Ramadhan dan Zulkifli (2020) menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang baik dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan dan kualitas laporan keuangan. Kabupaten Boven Digoel perlu merumuskan kebijakan fiskal yang mendukung pengelolaan keuangan yang baik.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Pernyataan kebaruan ilmiah dalam penelitian ini terletak pada analisis mendalam tentang integrasi teknologi informasi modern, seperti blockchain dan kecerdasan buatan, dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Boven Digoel. Sebagai daerah yang relatif terpencil di Provinsi Papua Selatan, Boven Digoel menghadapi tantangan unik dalam hal infrastruktur dan sumber daya manusia yang terbatas. Penelitian ini akan menyelidiki bagaimana implementasi teknologi ini dapat meningkatkan akurasi, efisiensi, dan transparansi laporan keuangan, serta mengatasi kendala yang ada. Studi ini menawarkan pendekatan inovatif yang belum banyak diterapkan di daerah-daerah dengan kondisi serupa di Indonesia, memberikan panduan praktis untuk penerapan teknologi yang relevan dalam konteks lokal.

Selain itu, penelitian ini juga akan menyoroti peran partisipasi komunitas adat dalam pengelolaan keuangan daerah, suatu aspek yang sering terabaikan dalam literatur keuangan publik. Kabupaten Boven Digoel memiliki populasi adat yang signifikan, dan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan keuangan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Dengan menggabungkan pendekatan teknologi dan sosial budaya ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam literatur tentang pengelolaan keuangan daerah, serta menawarkan model yang dapat direplikasi di daerah-daerah lain dengan karakteristik serupa.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengelolaan keuangan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah di Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan. Secara khusus, penelitian ini akan menyelidiki peran integrasi teknologi informasi modern, seperti blockchain dan kecerdasan buatan, dalam meningkatkan akurasi, efisiensi, dan transparansi laporan keuangan. Selain itu, penelitian ini juga akan menyoroti pentingnya partisipasi komunitas adat dalam pengelolaan keuangan daerah, dengan harapan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam literatur pengelolaan keuangan daerah serta menawarkan panduan praktis untuk penerapan teknologi dan partisipasi masyarakat dalam konteks lokal.

II. METODE

Pendekatan penelitian adalah semua metode atau cara ilmiah pada suatu aktivitas penelitian mulai dari alur merumuskan masalah sampai menyelesaikan hingga menghasilkan suatu kesimpulan, ada dua jenis penelitian pada sebuah penelitian yakni pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh Silalahi (2006:76), metode penelitian merupakan metode yang dimanfaatkan penulis untuk bisa mencapai tujuan dan memperoleh sebuah jawaban dari masalah yang diajukan. Sedangkan berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Sugiyono (2017:82), menyatakan jika sebuah penelitian harus memiliki tujuan dan manfaat, terdapat tiga jenis tujuan yang ada pada penelitian yakni temuan, pembuktian, hingga pengembangan.

Pada temuan ini penulis akan mendapatkan data maupun informasi yang paling baru berhubungan dengan sebuah kajian, kemudian dari temuan ini dapat dibuktikan jika data yang didapatkan menjadi sebuah bentuk untuk menjawab rasa ragu pada data dan informasi yang didapatkan. Tahapan

selanjutnya adalah pengembangan, pada tahap pengembangan penulis akan mengetahui aspek untuk memberikan wawasan yang lebih luas berhubungan dengan fakta yang diperoleh. Untuk menyelesaikan masalah dan memberikan solusi maka diperlukan desain penelitian. desain sebuah penelitian akan mempengaruhi tingkat akurasi maupun hasil sehingga bisa mencapai sasaran dan kebenaran dari penelitian yang dilaksanakan sehingga wajib untuk dipertanggungjawabkan.

Sumber informan yang penulis gunakan yaitu sumber informan key informan (informan kunci) dan informan pendukung. Informan digunakan sebagai sumber data yang dipercaya dapat menghadirkan informasi atau data yang lengkap serta relevan terhadap tujuan penelitian. Peneliti menggunakan purposive sampling karena sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh satuan sampling yang memiliki karakteristik yang dikehendaki. Teknik pengumpulan informan yang digunakan adalah snowball sampling, teknik ini digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan sampel lanjutan berdasarkan hasil dari informasi yang diberikan oleh sampel sebelumnya (Setiawan, 2018). Teknik lain yang digunakan adalah theoretical construct sampling, teknik ini digunakan untuk memperoleh informan atau mengumpulkan data yang memenuhi karakteristik teoritis atau kerangka kerja konseptual tertentu.

Instrumen penelitian merupakan alat dalam mengumpulkan data sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan lebih mudah. Sugiyono (2018) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Sehingga peneliti harus dapat menentukan fokus penelitian, memilih informan yang akan diwawancarai, mengumpulkan dan menganalisis data serta menarik kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data sesuai dengan tata cara penelitian sehingga data yang dibutuhkan dapat didapatkan. Menurut Sugiyono (2018) dalam bukunya Memahami penelitian kualitatif mengatakan “Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.” Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, observasi dan wawancara.

Teknik analisis data adalah teknik untuk merubah data menjadi informasi. Ketika melaksanakan sebuah penelitian peneliti harus melakukan analisis supaya data dapat mudah untuk dimengerti. Analisis data juga diperlukan untuk memperoleh solusi atas masalah yang ada. Berdasarkan pemaparan yang dituliskan oleh Sugiyono (2017:50), analisis data adalah tahapan dalam mengkategorikan urutan informasi ke dalam beberapa ketentuan untuk mendapatkan hasil yang sejalan dengan informasi yang sudah diperoleh. Pada penelitian ini diimplementasikan teknik analisis deskriptif kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengelolaan Keuangan Di Kabupaten Boven Digoel

Bagian ini menjelaskan bagaimana pengelolaan keuangan di Kabupaten Boven Digoel dalam meningkatkan pengelolaan keuangan di Kabupaten Boven Digoel. Pengelolaan keuangan di Kabupaten Boven Digoel mengacu pada permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang pengelolaan keuangan daerah. Adapun alur pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Boven Digoel dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan di Kabupaten Boven Digoel menurut teori perba 2021 meliputi:

3.1.1 Perencanaan

Proses perencanaan keuangan daerah di kabupaten Boven Digoel berjalan dengan baik. Perencanaan dimulai dari proses perencanaan keuangan adalah proses menyusun strategi dan rencana untuk mengelola keuangan secara efektif. Ini melibatkan identifikasi tujuan keuangan, pengelolaan pendapatan dan pengeluaran, pengaturan dana darurat, investasi, pengelolaan hutang, dan merencanakan pensiun. Selain itu, perencanaan keuangan adalah proses yang membantu mengelola pendapatan, pengeluaran, dan investasi dengan bijaksana, sehingga perencanaan keuangan menjadi fondasi yang kuat dalam mencapai keberhasilan finansial jangka panjang dengan menetapkan tujuan keuangan yang jelas. Adapun perencanaan keuangan daerah di tetapkan melalui RENSTRA. RENSTRA BPKAD yang telah tersusun ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) BPKAD setiap tahunnya dan dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.

3.1.2 Pengorganisasian

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah keniscayaan dalam membangun pemerintahan yang mendasarkan diri pada prinsip – prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance), terlebih ketika komitmen pemerintah yang seluas – luasnya untuk memperkuat pemerintahan daerah melalui otonomi daerah sangat kuat. Penataan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik serta otonomi daerah merupakan kekuatan yang besar bagi percepatan kemajuan pembangunan negara dan bangsa Indonesia, khususnya bagi daerah Kabupaten/ Kota, karena kemajuan negara/ daerah tidak hanya tergantung pada umur dan sumberdaya alamnya saja tetapi juga sangat dipengaruhi oleh sumberdaya pada manusianya. Pengorganisasian merupakan proses mengatur segala aktifitas pengelolaan keuangan. Proses ini mencakup pembagian tugas dan tanggungjawab pengelolaan keuangan. Pengorganisasian juga mencakup kebijakan yang dibuat dalam pengelolaan keuangan. Bapak Kepala BPKAD Kabupaten Boven Digoel Warinto Gultom mengatakan bahwa untuk staff dan juga sumber daya manusia sudah lengkap lagi sudah bergelar serjana. Ini merupakan gambaran pentingnya pengelolaan organisasi dan kesesuaian dengan juknis dan aturan yang sudah ditetapkan sehingga terwujud sesuai dengan perencanaan yang dibuat.

3.1.3 Pengarahan

Pengarahan atau pengendalian laporan keuangan adalah tahap penting yang mencakup aktifitas pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan. Dalam proses pengarahan kegiatan keuangan berpedoman pada Permendagri nomor 22 tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Proses pengarahan mencakup 2 aspek yaitu proses pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan proses penatausahaan pengelolaan keuangan daerah. Proses pelaksanaan dan penatausahaan merupakan lanjutan dari proses perencanaan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam hal ini BPKAD Kabupaten Boven Digoel. Pelaksanaan merupakan semua proses pelaksanaan pengeluaran dan penerimaan keuangan kas umum dicatat dan ditutup setiap akhir bulan.

3.1.4 Pengendalian Kegiatan Keuangan

Pengendalian Pengelolaan kegiatan keuangan adalah bagian akhir dari pengelolaan keuangan. Pengendalian keuangan mencakup proses pelaporan keuangan dan proses pertanggungjawaban keuangan. Dimana dalam proses pengendalian dapat dilihat sejauh mana pengendalian keuangan lewat pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh daerah. Proses pengendalian kegiatan keuangan adalah bagian yang penting dalam pengelolaan keuangan suatu organisasi karena mencakup tujuan dan keberhasilan organisasi. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 Laporan ini akan dinilai

sejauh mana pelaksanaan APBD dan kegiatan yang sudah dijalankan oleh pemerintah desa sekaligus bukti pelaksanaan anggaran pemerintah daerah Laporan keuangan daerah harus memuat semua pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di daerah berdasarkan perencanaan laporan pertanggungjawaban merupakan laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023. Realisasi Pendapatan Negara Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp8.699.468 atau mencapai 125,86 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp6.912.000. Realisasi Belanja Negara Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp7.340.955.591 atau mencapai 95,50 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp7.687.151.000.

3.2 Faktor Penghambat Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu rangkaian seperti perencanaan, pelaksanaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban Pengelolaan keuangan yang baik tentunya memiliki pelaporan keuangan yang baik pula Adapun faktor penghambat utama dalam penyampaian laporan keuangan seperti yang ditentukan dalam peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

3.2.1 Pengorganisasian

Belum berjalannya pengelolaan keuangan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing perangkat. Hal ini perlu didukung dengan kerjasama yang baik antara perangkat kerja yang ada di BPKAD kabupaten Boven Digoel. Terjadi penumpukan pelaporan keuangan karena ren sehingga dalam penanganan konsultasi pengelolaan desa mengalami penumpukan akibatnya mengalami keterlambatan. Ditambah jarak tempuh dari desa yang cukup jauh ke Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa.

3.2.2 Pengarahan

Dalam Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dihambat oleh kondisi daerah. Kondisi Internet yang kurang mendukung ini juga dapat memperlambat proses input lewat aplikasi sehingga memperlambat proses pengelolaan. Akibatnya mengalami keterlambatan pelaporan keuangan Pihak pengelola keuangan desa daerah faktor penting dalam penentuan keberhasilan pengelolaan keuangan daerah. Perangkat daerah sendiri perlu penambahan bimbingan terkait aplikasi.

3.2.3 Pengendalian

Kegiatan Keuangan selain faktor internal adapun faktor eksternal yang menghambat pengelolaan keuangan daerah salah satu penghambat adalah dari pihak pengawas dan pemberdayaan keuangan daerah dimana harus lebih tepat dan tepat dalam membina serta mengawasi jalannya pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini adalah laporan keuangan. Harus lebih diutamakan untuk menjawab kebutuhan bukan keinginan apalagi kepentingan. Pengelolaan keuangan juga perlu melibatkan semua unsur mulai dari tingkat paling dasar masyarakat serta aparat yang ditugaskan untuk membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Partisipasi sangat sekali dibutuhkan guna meningkatkan pengelolaan sehingga dalam pihak pengawas dan pembina juga harus memberikan dorongan dan motivasi sehingga lebih giat lagi dan teliti dalam hal pengelolaan keuangan guna meningkatkan kualitas laporan keuangan.

3.3 Upaya Peningkatan Pengelolaan Keuangan

Upaya peningkatan pengelolaan keuangan daerah dilakukan dari pihak Pemerintah dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini pelaporan keuangan. Upaya peningkatan pengelolaan sudah banyak dilakukan di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Hal ini dimulai dari pihak pembina dan pengawas serat difokuskan utama pada pemerintah yang langsung mengelola keuangan. Upaya peningkatan pengelolaan keuangan di Kabupaten Boven Digoel yang sudah dilakukan antara lain adalah sebagai berikut:

3.3.1 Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)

Salah satu upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan di Kabupaten Boven Digoel adalah penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Sistem ini dirancang untuk memudahkan pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan daerah secara real-time dan terintegrasi. Dengan adanya SIKD, diharapkan proses pengelolaan keuangan menjadi lebih transparan dan akuntabel, serta dapat mengurangi kesalahan manusia dalam pencatatan keuangan. Selain itu, penggunaan teknologi informasi ini juga memungkinkan adanya pemantauan yang lebih efektif oleh pihak berwenang, sehingga setiap transaksi keuangan dapat diaudit dengan lebih mudah dan cepat.

3.3.2 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM

Pemerintah Kabupaten Boven Digoel juga fokus pada peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah. Upaya ini dilakukan melalui berbagai pelatihan dan workshop yang berkaitan dengan standar akuntansi pemerintahan, pengelolaan anggaran, dan audit keuangan. Pelatihan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa para pegawai memahami dan mampu menerapkan regulasi terbaru dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan meningkatkan kompetensi SDM, diharapkan kualitas laporan keuangan daerah dapat ditingkatkan, serta mampu menghasilkan laporan yang akurat dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

3.3.3 Penguatan Pengawasan Internal dan Audit

Selain itu, penguatan pengawasan internal dan audit juga menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan pengelolaan keuangan di Kabupaten Boven Digoel. Pemerintah daerah telah memperkuat peran Inspektorat Daerah sebagai lembaga pengawasan internal untuk melakukan review rutin terhadap pelaksanaan anggaran dan kegiatan keuangan lainnya. Audit internal yang lebih ketat dan berkala dapat membantu mendeteksi potensi penyimpangan atau kesalahan dalam pengelolaan keuangan sejak dini. Dengan pengawasan yang lebih baik, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa semua proses keuangan berjalan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama dari penelitian ini menyoroti beberapa aspek penting dalam pengelolaan keuangan di Kabupaten Boven Digoel. Pertama, terdapat kebutuhan yang mendesak untuk terus meningkatkan penerapan teknologi informasi, seperti Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), guna memperbaiki proses pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan. Meskipun telah ada upaya untuk menerapkan teknologi ini, masih diperlukan investasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa SIKD berfungsi secara optimal dan terintegrasi dengan baik dengan sistem yang ada.

Kedua, temuan ini menunjukkan pentingnya penguatan kapasitas dan kompetensi SDM yang terlibat dalam pengelolaan keuangan. Pelatihan dan pembinaan yang terfokus pada pemahaman terhadap regulasi keuangan terbaru dan praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan dapat membantu meningkatkan kemampuan pegawai dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, peningkatan pengawasan internal dan audit juga menjadi hal yang krusial dalam memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan mencegah potensi penyimpangan atau kesalahan dalam pengelolaan keuangan. Dengan demikian, diskusi temuan utama ini menekankan pentingnya upaya kolaboratif antara penerapan teknologi, pengembangan SDM, dan penguatan pengawasan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di Kabupaten Boven Digoel.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Selain temuan utama, penelitian ini juga mengungkap beberapa aspek menarik lainnya yang patut dipertimbangkan dalam upaya meningkatkan pengelolaan keuangan di Kabupaten Boven Digoel. Salah satunya adalah pentingnya meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi terkait dengan pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat. Dengan memberikan akses yang lebih luas terhadap informasi keuangan, masyarakat dapat lebih terlibat dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan terkait dengan alokasi anggaran. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti perlunya sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mengembangkan model pengelolaan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, temuan menarik lainnya ini menggarisbawahi pentingnya partisipasi aktif semua pemangku kepentingan dalam menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang efektif dan akuntabel di Kabupaten Boven Digoel.

IV. KESIMPULAN

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boven Digoel perlu menjaga manajemen pendapatan yang efektif dengan melancarkan proses pemilihan biaya dan memperluas basis biaya. Ini akan berdampak pada pencatatan pendapatan yang lebih akurat dan tercermin dalam laporan keuangan tahunan. Selain itu, pengendalian pengeluaran dan penggunaan biaya juga menjadi faktor penting yang harus diperhatikan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Pengelolaan aset moneter yang tepat dapat menghasilkan perencanaan yang lebih baik dan pengeluaran yang terkontrol, yang akan tercermin dalam laporan keuangan. Upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan juga membutuhkan manajemen keuangan yang teratur, wajar, dan optimal. Evaluasi yang cermat terhadap manajemen keuangan akan memastikan pencatatan dan pengungkapan keuangan yang akurat, termasuk jumlah pokok, biaya pinjaman, dan rencana penggantian.

Keterbatasan Penelitian. Keterbatasan penelitian ini meliputi batasan dalam akses data yang mungkin mempengaruhi kedalaman analisis, terutama jika data yang tersedia terbatas atau tidak lengkap. Selain itu, keterbatasan sumber daya seperti waktu dan anggaran juga dapat membatasi cakupan penelitian dan mempengaruhi kemampuan untuk melakukan pengamatan yang lebih mendalam atau pengumpulan data tambahan. Selanjutnya, kendala metodologis seperti kesulitan dalam mengukur variabel yang kompleks atau kurangnya kontrol atas faktor-faktor eksternal juga dapat membatasi interpretasi temuan dan generalisasi hasil penelitian. Dengan mengakui keterbatasan-keterbatasan ini, penting bagi penelitian ini untuk menawarkan pemahaman yang seimbang dan kontekstual terhadap temuannya.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Untuk arah masa depan penelitian, penting untuk melakukan studi lanjutan yang lebih mendalam mengenai implementasi teknologi informasi, seperti penggunaan sistem blockchain, dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Boven Digoel. Penelitian tersebut dapat mengeksplorasi lebih lanjut potensi teknologi ini dalam meningkatkan transparansi, keamanan, dan efisiensi pengelolaan keuangan, serta bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Selain itu, studi lebih lanjut juga dapat memfokuskan pada peran partisipasi masyarakat dan penerapan praktik good governance dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif untuk perbaikan sistem pengelolaan keuangan di Kabupaten Boven Digoel.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Selatan atas kerjasama, dukungan, dan partisipasi mereka dalam penelitian ini. Tanpa kontribusi dan kerjasama dari pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, penelitian ini tidak akan terwujud. Ucapan terima kasih kami sampaikan atas kesediaan mereka untuk berbagi informasi dan pengalaman yang berharga, yang telah membantu dalam penyusunan temuan dan rekomendasi penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Boven Digoel.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Harun, H., & Kamase, H. (2020). Transparency and accountability in local government financial management: Evidence from Indonesia. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 32(1), 23-46.
- Labolo, M. (2007). Memahami Ilmu Pemerintahan (M. Labolo, Ed.; Revisi). PT Raja Grafindo Persada.
- Nugroho, H. (2021). Human resource development and its impact on regional financial reporting quality. *Journal of Government and Public Policy*, 4(3), 178-190.
- Priyanto, H., & Handayani, R. (2021). Budget management efficiency and its impact on financial statement quality. *International Journal of Public Sector Management*, 34(2), 100-114.
- Putri, D. A., & Raharjo, T. (2020). The role of internal control in enhancing financial reporting quality: A study on local governments in Indonesia. *Journal of Auditing and Assurance Services*, 6(1), 55-67.
- Ramadhan, M., & Zulkifli, Z. (2020). Fiscal policy and its impact on regional financial statement quality. *Journal of Public Finance and Budgeting*, 10(3), 89-103.
- Santoso, B. (2020). The role of the Audit Board of Indonesia in enhancing regional financial accountability. *Journal of Financial Accountability and Management*, 36(3), 278-292.
- Sari, E. A., & Kurniawan, A. (2021). Public participation and its impact on regional financial management. *Journal of Public Administration and Governance*, 11(4), 45-60.
- Sedarmayanti. (2011). Good Governance (keperintahan yang baik). : Mandar Maju.
- Setiawan, A. (2018). Teknik Pengambilan Sampel Snowball dalam Penelitian Kualitatif: Sebuah Tinjauan Literatur. 25(1), 1-10.
- Setiawan, A. (2019). Government accounting standards implementation and its impact on financial reporting quality in Indonesia. *Journal of Accounting and Public Policy*, 8(4), 200-212.
- Silalahi, U. (2016). Metode Penelitian Sosial. Jakarta: Rineka Cipta.

- Sugiyono, S. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, S. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wijaya, R. (2019). Internal control systems and financial reporting quality in local governments. *Journal of Government Financial Management*, 68(1), 23-37.
- Yusuf, M., & Tahir, M. (2019). The impact of information technology on public sector financial management in Indonesia. *Journal of Finance and Accounting*, 7(2), 34-45.

